

RUNTUHNYA KESULTANAN PATANI DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT PATANI PADA ABAD 20

Abdulbasit Chetae¹, Agus Fiadi²
Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
agus.fiadi@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan perjuangan masyarakat melayu Patani melawan usaha pengintegrasian pemerintahan Thailand Rumusan masalah dalam penelitian ini; faktor-faktor apa saja yang menyebabkan jatuhnya Kesultanan Patani, apa saja kebijakan Siam (Pemerintahan Thailand) terhadap umat Islam Patani dan bagaimana kondisi umat Islam Patani dibawah Rezim pemerintahan Thailand. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode historis. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Pertama, Jatuhnya Kesultanan Patani disebabkan tidak ada pengganti yang cocok., Kedua, kesepakatan perjanjian perbatasan antara Inggris dan Thailand, Patani Raya mmenjadi bagian integrasi Pemerintahan Thailand.. Ketiga, masyarakat Patani menuntut otonomi seperti di bidang ekonomi, budaya, Pendidikan, dan agama, yang dipimpin oleh seorang ulama bernama H. Sulong. Dan langkah yang paling penting adalah bergerak dengan nama Gabungan Melayu Patani Raya (GEMPAR). Bagi masyarkat Melayu Patani tidak pernah merasa sebagai bagian dari bangsa Thai .Oleh karena itu, mereka tidak ingin diatur oleh Bangkok, mereka ingin mengatur diri mereka sendiri.

Kata Kunci: Mundurnya Kesultanan Patani, Kerajaan Siam (Thailand), GEMPAR

Pendahuluan

Patani yang dimaksud bukan Provinsi atau “*Changwat Pattani*” sebagaimana wujud dalam peta negara Thailand sekarang, tetapi merujuk kepada sebuah negeri yang lebih luas, meliputi provinsi-provinsi Narathiwat, Yala, dan sebagian wilayah Senggora (Daerah-daerah Sebayur dan Tiba).¹ Negeri Patani mempunyai sejarah yang cukup lama dan tua, jauh lebih lama dari sejarah negeri-negeri di Semenanjung Melayu seperti Malaka, Johor dan Selangor. Sejarah kuno Patani merujuk kepada kerajaan Melayu tua perngaruh dari India yaitu Kerajaan Langkasuka.² Penelitian yang dilakukan oleh *prince of Songkla Universiti* di Patani, berpendapat bahwa Langkasuka terletak di Patani. Pendapat ini disokong oleh beberapa sejarawan lain seperti Prof. Zainal Abidin Wahid, Mubin Shepard, Prof. Hall dan Prof. Paul Wheatly.

Patani adalah sebuah wilayah bagian dari kawasan dunia Melayu. Para peneliti yang melakukan pengkajian dan penelitian di dunia Melayu sangat menyadari bahwa sebuah wilayah yang bernama Patani telah lepas dari bagian bangsa-bangsa Melayu pada saat ini. Lebih rumit

¹. Ahmad Fathy al-fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Pustaka Darusssalam, Alor Star, 1994), hlm. 3.

². Langkasuka adalah sebuah kerajaan Melayu tua yang terletak di Semenanjung tanah Melayu yaitu di selatan Thailand dan Kedah (Malaysia) sekarang.

lagi persoalan negeri Patani bukan sekedar persoalan barang hilang, akan tetapi lebih dari itu. Dalam hal ini betapapun getirnya penderitaan orang Islam di Palestina, Rohingya, dan Syiria. Namun nasib mereka masih lebih baik ketimbang dengan nasib orang Islam di Patani karena persoalan mereka masih belum mendapat tempat di berbagai media dan forum antarbangsa.

Masyarakat Pattani memeluk Islam diperkirakan pada abad ke 14 M, karena arus perdagnagan-terutama dari pasai, seorang pedagang yang bernama Syeikh Said, yang telah menyembuhkan sang Raja. Setelah sembuh raja Patani memeluk Islam. Dengan begitu Islam diikuti oleh para pegawai istana, pembesar kerajaan, menteri-menteri dan seluruh rakyat. Kemudian Syeikh Said juga memohon agar beliau mengganti nama menjadi nama Islam. Dengan itu beliau diberi nama menjadi Sulthan Ismail Syah sebagai pelopor pertama kerajaan Melayu-Islam patani Darussalam,³ kerajaan Pattani berkembang sampai abad ke 18 M. Namun sejak akhir abad ke 18 M. Kerajaan ini merupakan taklukan dari kerajaan Siam (Thailand).⁴ dan berlanjut Ketika Siam bermetamorfosa menjadi Thailand yang monarkhi konstituional (tahun 1932), maka Pattani menjadi provinsi di bawah kekuasaan negara Thailand⁵.

Hasilnya terjadilah asimilasi dan Patani berubah akibat adanya perubahan administrasi sesuai dengan keinginan Chulakong (Rama V)⁶. Perubahan itu diawali dengan menempatkan gubernur, wakil gubernur, hakim dan pegawai pemerintahan di wilayah para raja Melayu. Maka dengan begitu mereka perlahan-lahan berhasil menguasai wilayah Patani. Keadaan ini yang membuat budaya melayu Islam Patani terancam, yang mana program yang mereka canangkan dan aturan yang dibuat dilakukan untuk menghilangkan identitas agama dan budaya Islam patani sehingga bias dikonversi ke agama dan budaya Thailand yang berbasis Budhisme.⁷ Hal inilah yang melahirkan rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan masyarakat Islam melayu Pattani. Oleh karena itu masyarakat Islam Pattani tidak mau diatur oleh pemerintah Thailand, mereka ingin mengatur wilayah mereka sendiri⁸. Dengan maksud tersebut mereka ingin mendapatkan kekhususan, setidaknya memperoleh otonomi di bidang-bidang yang mendasar seperti budaya, hukum dan agama. kenapa kemudian perjuangan itu terus mereka lakukan sejak tahun 1903 hingga sekarang.

³ *Ibid*, hlm.31.

⁴ Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, (Selangor: Perpustakaan Negara Malaysia, 2006), hlm. 19.

⁵ Ali Sodiqin, "*Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik Dan Dinamikanya)*". *Ibda' Jurnal KebudayaanIslam* Vol. 14, No. 1, Januari - Juni 2016, hlm. 32.

⁶ Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Kedah: Pustaka Darussalam, 1994), hlm. 72.

⁷ Mohd Zamber A. Malek, *Umat Islam Patani, Sejarah dan Politik*, (Shah Alam: Perpustakaan Negara Malaysia, 1993), hlm. 164.

⁸ Moeftlich Hasbullah, *Asia Tenggara Konsentrasi Baru kebangkitang Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2003), hlm. 261.

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisa peristiwa-peristiwa masa lampau secara historis.⁹ Metode historis memerlukan empat langkah dalam penulisan dan pengolahan data, yaitu:

Heuristik: yaitu pencarian dan pengumpulan sumber data baik dengan sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan sumber data penulisan skripsi ini menggunakan sumber-sumber sekunder dengan telaah *library research* (penggunaan bahan-bahan dokumen tertulis seperti buku-buku, majalah, catatan-catatan, dan kisah-kisah sejarah lainnya).¹⁰ Dalam melengkapi sumber-sumber sekunde, maka penulis akan menambahkan sumber primer berupa informasi yang asal dari Patani serta beberapa penelitian mengenai kerajaan di Patani dan Thailand. *Kritik* : setelah sumber-sumber data tersebut terkumpul, penulis akan mengklasifikasikan keotentikan dan kredibilitas sebuah sumber data. Otentik dalam arti memilih mana sumber asli dan benar, sedangkan kredibilitas dalam arti menyelidihkan kritis terhadap sumber-sumber yang ada agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan informasi mengenai Patani dan Thailand.¹¹ *Interpretasi* : analisis terhadap sumber-sumber data yang telah diteliti kredibilitas dan keotentikannya, dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial. Kemudian penulis akan menemukan korelasi dan solusi baru mengenai tema yang akan dibahas. *Historiografi* : tahap terakhir dalam prosedur penelitian sejarah, merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian dengan memperhatikan aspek kronologi sejarah. Yakni dimulai dengan bagaimana kondisi sosial Patani masa Kerajaan Samudra hingga terjadinya perubahan kehidupan masyarakat Melayu Patani terhadap upaya modernisasi pemerintahan Thailand.

Hasil dan Pembahasan

Runtuhnya Kesultanan Patani Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Patani

A. Penyebab Runtuhnya Kesultanan Patani

Di akhir tahun 1680an (abad 17 M) diakhir pemerintahan Raja Kuning kesultanan Patani mulai terlihat kemundurannya. Pemerintahan Raja Kuning berlangsung antara tahun 1635-1686. Pada masa pemerintahannya Raja Kuning lebih mengutamakan usaha dalam bidang perdagangan dengan dibentuknya Sarekat Perdagangan Diraja Patani, dan juga menjalin hubungan yang baik dengan Kesultanan Johor. hubungan yang baik ini melahirkan kondisi perekonomian yang baik di kedua kesultanan. semenjak Raja Kuning pemerintahannya mulai berakhir kemerosotan itu muncul. selain masalah politik juga akibat adanya

⁹ Dudung Abdulrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 54.

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Bumi Aksara: 2004), hlm. 20.

¹¹ Dudung Abdulrahman, *Metode Penulisan Sejarah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 99.

perselingkuhan dengan Penari istana.¹² Selain itu, terjadi perselisihan dengan kerajaan Siam dan juga usia Raja Kuning sudah tua.

B. Kesultanan Patani di bawah Dinasti Kelantan

Apa yang sudah di uraikan sebelumnya, wafatnya sang Sultan/Raja mulai menandai berakhirnya pemerintahan kesultanan Patani. Karena tidak ada keturunan yang cocok untuk memimpin kesultanan Patani. Walaupun kesultanan ini mulai merosot keberadaanya akan tetapi eksistensinya tetap ada. Dimana para pembesar kesultanan kemudian melakukan musyawarah dan kesepakatan untuk memutuskan bahwa keturunan dari raja-raja Kelantan yang tinggal di Kampung Raja dapat menggantikan raja Kuning.¹³

Kemudian selanjutnya kepemimpinan dari Dinasti Kelantan dimulai dan yang pertama dipimpin oleh raja Bakar dan berikutnya oleh Raja Mas Kelantan dan selanjutnya estapet kepemimpinan dipegang oleh Raja Mas Jayam. Karena Raja terakhir ini tidak meninggalkan putra mahkota atau pewaris tahta maka dilakukan lagi kesepakatan dan musyawarah oleh para pembesar kesultanan, musyawarah dan kesepakatan para pembesar dilaksanakan dan akhirnya memilih Sultan Muhammad untuk menjadi penguasa di Kesultanan Patani. Saat kesultanan masih dipimpin oleh Raja Bakar, Mas Kelantan dan Mas Jayam kondisi kesultanan Patani sangat baik, aman dan tenang dan tidak pernah diserang oleh musuh-musuhnya terutama orang-orang Siam Tha. Sebaliknya terjadi seranganketika Patani di pimpin oleh para Seri Wangsa Pelabuhan di Patani diisi oleh para saudagar dari Eropa dan hanya di isi oleh Saudagar dari China, Arab Jepang serta India Muslim.¹⁴

Perselisihan dengan kerajaan Siam belum pernah terjadi karena kerajaan Siam pada waktu itu lebih banyak menyelesaikan masalah dengan Burma, karena Burma sering melakukan penyerangan kepada kerajjan Siam sehingga mereka lebih focus ke sana. Setelah keadaan membaik Raja Muda Siam berniat mengirim utusan kepada Patani, namun Sultan Muhammad menolak keinginan Raja Siam tersebut. Hal ini memancing peperangan kontak langsung antara Siam dengan Patani, namun persiapan Sultan Muhammad yang kurang baik dari segi peralatan tempur dan sumber daya manusia menyebabkan kalahnya Kesultanan Patani atas kerajaan Siam (Thailand) dan setelah itu undang-undang Kesultanan berganti dengan perundang-undangan Siam (Thailand). Kemudian menentukan seorang Sultan yang bernama Tengku Lamidin. Hal ini menandai hak penuh Siam (Thailand) atas Patani.

Meski demikian, Sultan Lamidin yang diangkat oleh Siam itu memiliki rasa nasionalisme yang tinggi atas tanah kelahirannya, maka pada tahun 1789 M Sultan

¹² Yang Di Pertuan Muda Raja Johor Suami Raja Kuning, telah di sihir oleh Penari Istana yang Bernama Dang Sirat. Baginda dikatakan telah hilang akal karena terlalu kasih pada Dang Sirat. Akibat dari godaan palsu itu, baginda tidak lagi bersemayam di istana besar, tetapi sering bersendirian di taman diraja *Rangkai Sakti* siang dan malam, lihat juga Mohd Zamber A. Malek, *Umat Islam Patani, Sejarah dan Politik*, (Shah Alam: Perpustakaan Negara Malaysia, 1993), hlm. 75.

¹³ P. Rudolf Yuniarto, *Integrasi Muslim Patani: Reidentitas Sosial atas Dominasi*, (Nasional Thailand, LIPI, Internet Format PDF), hlm. 5.

¹⁴ Ibrahim Syukri, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002), hlm. 67.

Lamidin mengutus utusanya kepada raja Annam (Vietnam) untuk bekerjasama melawan Siam, namun surat yang dikirim oleh utusannya malah di berikan kepada Raja Siam yang mengakibatkan marahnya Raja Siam dan pada akhirnya pada tahun 1791 M. Patani mendapat serangan kembali oleh Kerajaan Siam dan akhirnya mengalami kekalahan. Akhirnya, Siam (Thailand) memilih pembesar Melayu Patani kembali yaitu Datuk Pangkalan sebagai pemimpin di Patani. Datuk Pangkalan pun membelot dari aturan yang telah ditetapkan Siam dan pada akhirnya Patani mengalami kekalahan kembali. Kemudian kerajaan Siam (Thailand) memilih seorang dari Negara nya sendiri untuk memimpin Patani yang bernama Nai Khuan Sai.¹⁵

Selanjutnya dalam perkembangan usaha untuk memcah belah persatuan kesultanan Patani, maka Patani di bagi menjadi tujuh wilayah yang masing masing memiliki pemimpin sendiri; pertama Nik Dih diangkat menjadi Raja Teluban ditempatkan di kota Taluban, kedua Nai Pai diangkat menjadi Raja Sai dan ditempatkan di Kota Jerenga; ketiga Nik Dah diangkat menjadi Raja Legeh dan ditempatkan di Kota Legeh, empat Tuan Jalur diangkat menjadi Raja Jalur dan ditempatkan di Kota Jala, lima Tuan Mansur diangkat menjadi Raja Reman dan ditempatkan di Kota Baharu, enam Tuan Nik diangkat menjadi Raja Nongcik dan ditempatkan di Kota Nongchik, tujuh Tuan Sulong diangkat menjadi Raja Patani dan di tempatkan di Kota Griseik.

Telah penulis paparkan sebelumnya eksistensi kesultanan Patani mulai mengalami kemerosotan keberadaanya karena tidak adanya penerus yang cocok dan Sultan atau Raja dan mumpuni untuk mempertahankan kondisi kesultanan. Keadaan semakin sulit ketika kesultanan ini di serang oleh kerajaan Siam kemudian menjadi bagian wilayah kekuasaan kerajaan tersebut dan perkembangan selanjutnya situasi Patani semakin terpojok akibat adanya perjanjian antara pihak kerajaan Inggris dengan kerajaan Siam (Thailand) dalam hal pembagian wilayah. Situasi politik regional akibat adanya kolonialisasi Eropah di wilayah Asia mendorong Siam (Thailand) untuk merekonstruksi wilayah kekuasaan mereka untuk membendung arus imprialis yang ingin menguasai wilayah Semenanjung. Terlebih lagi wilayah seperti Kelantan, Kedah, Terengganu, dan Patani yang di nilai amat baik untuk wilayah pelabuhan ekonomi dan pangkalan perang armada Inggris.

C. Apa kebijakan Rezim Pemerintahan Thailand terhadap umat Islam Patani

1. Bidang Politik

Pemerintah Thailand mengeluarkan beberapa kebijakan untuk dapat merubah masyarakat Patani Melayu. Kebijakan dan aturan yang dibuat itu mencakup masalah budaya dan agama. Lima kebijakan itu;

a. Politik Dominasi

Suatu siasat yang dijalankan pemerintahan Thailand untuk merampas bumi Patani melalui kekerasan-kekerasan yang sporadis, tindakan ini dilakukan melalui dua hal tahap,

¹⁵ *Ibid*, hlm. 81.

yaitu: Pertama, menaklukkan Patani kemudia mengintegrasikan kerajaan Patani sebagai suatu wilayah yang berada di bawah perlindungan kerajaan Siam (Thailand), dan kerajaan Patani harus mengirim bunga emas, dan diberi status sebagai negara yang otonomi di bawah naungan kerajaan Siam (Thailand) 1902-1938 M. Kedua, melaksanakan politik yaitu, Patani dijadikan suatu wilayah dalam sistem pemerintahan negara Thailand dibawah konstitusi kerajaan, dan tidak dapat dipisahkan lagi di bawah dasar kesatuan negara Thailand.

b. Politik Eksploitasi

Pemerintah Thailand juga melakukan penindasan ekonomi terhadap bangsa Melayu Patani, yaitu mengeksploitasi semua sumber daya alam Patani, penindasan ini dilakukan dengan politik monopolistik demi kepentingan golongan mereka dan untuk pembangunan kerajaan Siam (Thailand) di Bangkok, maka rakyat Melayu Patani merupakan hamba abdi, fakir melarat dan papa dalam tanah air yang penuh dengan kekayaan.

c. Politik Asimilasi

Merupakan salah satu cara penghancuran dan mempersiapkan kebangsaan Melayu, keturunan, sosial dan kultural. Politik ini dengan membawa penekanan ke atas rakyat Melayu Patani supaya mengakui di atas tiga konsep berikut:

- a) Kebangsaan Siam
- b) Kewarganegaraan Thailand
- c) Keturunan Thailand

Ketiga-tiga wacana nasional diatas telah di respon oleh masyarakat Melayu Patani dengan menolaknya, namun pemerintah Thailand merespon kembali dengan ancaman dan tuduhan melawan kerajaan dan berhak di cabur hak kewarganegaraannya.

d. Politik Divide and Rule

Pada masa pemerintahan Nai Phai sering terjadi konflik diantara orang Patani dengan pemerintah. Akhirnya Nai Phai mengadu hal ini ke Bangkok. Apabila diketahuai oleh kerajaan di Bangkok maka terus di gunakan pulisi pecah dan perintah "*Divide and Rule*". Raja Siam mengirimkan pembesarnya dari Bangkok yang bernama Phaya Aphai di Patani untuk menyelesaikan konflik. Ia mengadakan pembaharuan sistem pemerintahan pada tahun 1815 Patani dibagi menjadi 7 nageri¹⁶ yaitu:-

- | | | |
|------------|----------|--|
| 1. Patani | dilantik | Tuan Sulung (keturunan datu penggalan) |
| 2. Nongcik | dilantik | Tuan Nik |
| 3. Jaring | dilantik | Nai Phai (Seorang dari Siam) |
| 4. Saiburi | dilantik | Nik Doh |
| 5. Jala | dilantik | Tuan Jalur |
| 6. Raman | dilantik | Tuan Mansur |
| 7. Rangik | dilantik | Nik Deh |

¹⁶. A. Bangnara, *Sejarah Patani Dahulu dan Sekarag*, (Kota Bharu, Kelantan: Pustaka Aman Press, 1977), hlm. 36

Satu cara untuk mengadu domba orang Melayu dengan bijak dari mereka sehingga menyebabkan orang Melayu Patani bertengkar sesama sendiri, dan juga secara tidak sadar masyarakat Melayu Patani telah dijadikan sebagai mata-mata bagi kaumnya sendiri.

e. Politik Transmigrasi

Strategi politik ini ditandai dengan pemindahan warga Siam yang beragama Budha dari Bangkok dan wilayah lain kedalam wilayah tinggal masyarakat Patani dengan cara membuka perkampungan baru atau *Nikkum Patana Sang Tua-eng*, ditempatkan warga Siam yang sengaja di pindahkan ini bertujuan sebagai berikut:

- a) Untuk meningkatkan jumlah penduduk yang baru datang (orang Siam yang beragama Budha) di antaranya penduduk asal dengan dicampur adukkan penduduk-penduduk dalam perkampungan itu.
- b) Untuk penyamaan rasio penduduk Thailand Budha semua provinsi di Thailand, khususnya di wilayah pemukiman orang-orang Melayu-Patani.

2. Bidang Ekonomi

Kebijakan proses integrasi Patani ke dalam wilayah Thailand melalui penekatan pada kebutuhan ekonomi. Hal ini dilakukan, agar negara memiliki pendapatan yang cukup dan memiliki sumber tenaga untuk mendukung pertahanan negara. Berdasarkan tujuan inilah dapat diketahui, jika tahapan adaptasi yang dilakukan Siam (Thailand) adalah untuk penguatan dan rasionalisasi administrasi dan pengembangan ekonomi. Proses awal kebijakan tersebut pada tingkat ekonomi dan kesejahteraan sosial, pemerintah Thailand melakukan tahapan adaptasi melalui kebijakan eksploitasi koleksi karet dan pertambangan timah terhadap orang Patani dan pekerja migran, walaupun sebagian besar mata pencarian Melayu Islam Patani adalah nelayan.¹⁷ Di samping itu, pemerintah Thailand juga mengenalkan sistem baru dalam koleksi pajak, seperti sistem pajak candu (pajak pertanian). Sistem ini berlangsung atas usulan Phya Sukhum, hasil pajak tersebut akan dibagi dua antara raja Siam (Thailand) dan raja Patani. Pada mulanya sistem pajak ini ditentang pihak Patani, namun Chulalongkorn meyakinkan bahwa sistem pajak ini sangat menguntungkan.

Tahun pertama berjalan cukup rapi, hasil pajak ini dibagikan ke tujuh Negara bagian Patani sebesar \$ 30,200 pertahun.¹⁸ Situasi ini tidak berlangsung lama, setelah tahun kedua sistem pajak tersebut berjalan, Siam mengingkari perjanjian pajak yang telah disepakati. Hal ini benar-benar menimbulkan kemarahan raja Patani dengan mengancam akan melakukan tindakan yang lebih keras, karena menganggap Siam membahayakan otoritas raja Patani.

Sikap Siam (Thailand) yang berupaya mengingkari perjanjian pajak dengan Patani, merupakan faktor yang dapat memperburuk hubungan adaptasi yang telah dibangun sesuai dengan kesepakatan. Maka kemungkinan munculnya konflik sangat besar, karena proses adaptasi dan akomodasi sama-sama menekankan suatu pekerjaan yang membutuhkan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 51.

¹⁸ Paulus Rudolf Yuniarto, "Integration of Pattani Malays: a Geopolitical Change Perspective", dalam *Multiculturalism, Separatism, and Nation State building in Thailand*, (Indonesia: Pusat Penelitian Sumberdaya Regional, 2004), hlm. 54.

penyesuaian, dan dalam tahapan ini kedua pihak yang melakukan kerjasama belum tentu berada dalam satu lingkaran kepentingan yang sama.

Dalam kasus Patani, konflik terjadi kembali akibat pelaksanaan daripada perjanjian pajak yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga dapat dikatakan, sistem pajak pertanian antara Siam dengan Patani sebagai langkah pertama integrasi tidak berhasil, akibat kelalaian dari pada pajak Siam (Thailand) sendiri. Di satu sisi, ketegangan akibat kelalaian tersebut menyeruak kembali, dan mendesak Siam (Thailand) menerapkan beberapa kebijakan politik untuk menyatukan persepsi dan tujuan dan tujuan masing-masing pihak yang akan berintegrasi.

Akan tetapi, Siam (Thailand) berhasil mengkonsolidasi beberapa sistem kebijakan demi mengatasi kemarahan dan kemungkinan terjadi pemberontakan di kalangan para raja dengan membangun beberapa akses sarana demi kebutuhan birokrasi dan mengatasi kemarahan raja Patani atas kebijakan-kebijakan di atas. Siam membuat strategi pembangunan seperti yang dilakukan Inggris di Semenanjung Malaya. Siam mengutamakan pembangunan dalam bentuk prasarana jalan, pos-pos penjagaan keamanan bagi kegiatan komersial, serta pemukiman untuk orang Thai-Budha yang tinggal di wilayah Patani untuk menyeimbangkan jumlah dominasi penduduk Melayu Islam Patani.¹⁹

3. Bidang Budaya dan Pendidikan

Proses kebijakan integrasi Thailand terhadap Patani pun berlanjut pada bidang budaya, pendidikan dianggap alat utama dalam mempromosikan nasionalisme Thailand. Setelah pemerintahan raja Chulalongkon, putranya yang bernama raja Rama VI Vajiravudh (1910-1925) resmi menjadi raja Siam (Thailand). Kebijakan integrasi politik masa raja Vajiravudh adalah dengan menerapkan Undang-undang Pendidikan Nasional tahun 1921 M. Yang memaksa setiap lembaga pendidikan di Thailand untuk menggunakan bahasa Thai.²⁰

Kebijakan ini, menyelenggarakan program pendidikan sekuler yang dilakukan oleh para rahib Budha, kepala desa, dan para pejabat pendidikan pemerintah. Pada tahap ini, pemerintah Thailand mulai menekankan penggunaan bahasa Thailand setelah tahun 1910 M. Ada upaya terpadu untuk mendidik orang Melayu Islam Patani menjadi Thailand yang beragama Budha, dan ada kekhawatiran dari kaum bangsawan Patani, bahwa bahasa Thailand akan mengarah para erosi dari bahasa dan budaya Melayu.²¹

Setelah kematian raja Vajiravudh, tahta kerajaan Siam digantikan oleh raja Prajadhipok (1923-1935). Pada periode raja Prajadhipok, Siam Thailand memberlakukan kebijakan integrasi dengan mengkategorikan kebijakan tersebut menjadi dua, yakni *Politik Partisipation*

¹⁹ Surin Pitsuwan, *Islam di Mungthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 29.

²⁰ Cahyo Pamungkas, , "The State Policies Towards Southern Border Provinces", dalam *Multiculturalism, Seoaratism and Nation State Building in Thailand*, Jakarta: Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR-LIPI), 2004., hlm. 67.

²¹ S.P. Harish, *Changing Conflik Identities: The Case of the Southern Thailand*, No. 107 (February 2006), (Singapore, Institute of Defence and Strategic Studies), hlm. 6.

(politik partisipasi) dan *Cultural Assimilation Policy* (politik asimilasi budaya).²² Kebijakan politik partisipasi terjadi akibat adanya perubahan politik di internal Siam yang signifikan. Munculnya kudeta dari Partai Rakyat kekuasaan raja (People's Party of the King's power) dan konflik internal pemerintah antara menteri Pertahanan, pangeran Bobaradej, dengan menteri Perdagangan, Pangeran purachatra²³. Akibatnya, Bangkok mengalami krisis politik.

Di satu sisi, terjadi gerakan bawah tanah yang diprakarsai oleh cendekiawan kelas bawah, yaitu Mr. Pridi Panomyong. Tanggal 24 Januari 1932 M. Beliau mendirikan lembaga politik untuk mengambil kekuasaan revolusi tanpa kekerasan. Inti dari UUD (undang-undang dasar) 1932, yaitu mengakui status raja sebagai kepala angkatan bersenjata dan pelindung Budha, serta penganut agama lainnya. Prinsip yang dianut dalam undang-undang tersebut, untuk mempertahankan dan menjamin pembebasan semua warga negara baik dalam politik maupun ekonomi.

Krisis politik yang dialami Siam (Thailand) saat itu, dan munculnya kebijakan integrasi politik partisipasi, dimanfaatkan oleh Melayu Islam Patani sebagai momentum dalam mengikuti pemilu dan mencalon diri sebagai perwakilan dalam Dewan Konsultatif²⁴. Para kandidat dipilih oleh pemilih berasal dari kelompok intelektual yang didukung oleh para intelektual Islam. Surin Pitsuwan menyatakan bahwa tingkat partisipasi orang Islam Patani tergantung pada persepsi Siam tentang Islam Melayu di bawah perlindungan Inggris, jika kepentingan bersama Melayu Islam Patani baik yang ada di Patani maupun di Malaysia tersebut dilindungi hak-haknya oleh pemerintah, maka Melayu Patani bisa berpartisipasi kepada politik pemerintah Thailand.

Namun, peran dan pengaruh parlemen sangat terbatas dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi Melayu Patani dan untuk mengurangi campur tangan Inggris di Malaysia. Lembaga tersebut tidak memiliki otoritas atau kekuatan untuk mengendalikan atau menjalankan serangkaian kebijakan pemerintah di semua negara. Kebijakan berada di bawah pengawasan dan kontrol dari angkatan bersenjata dan biokrasi, karena itu, orang Melayu Islam Patani selalu menghadapi gencatan senjata dengan angkatan bersenjata pemerintah Thailand jika terjadi konflik.

Selain, kebijakan politik partisipasi, Siam (Thailand) juga mengintegrasikan Patani ke dalam politik asimilasi budaya. Selain pendidikan sebagai alat utama dalam mengintegrasikan budaya Patani ke dalam Thailand, pemerintah Thailand juga mengintegrasikan Patani ke dalam praktik birokrasi orang-orang Melayu. Di antaranya, dengan memaksa para pejabat Melayu Islam Patani melamar pekerjaan ke daerah-daerah utara yang didominasi oleh orang-orang Thai-Budha, dan dipertegas dengan himbauan dan instruksi agar para pejabat Melayu Patani tersebut ditugaskan ke daerah itu agar sikap dan wibawa mereka seperti orang-orang Thailand. Setelah itu, akhirnya keturunan para raja ditawarkan pelatihan kerja dari gubernur Thailand

²² Cahyo Pamungkas, "The State Policies Towards Southern Border Provinces", dalam *Multiculturalism, Seoratism and Nation State Building in Thailand*, Jakarta: Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR-LIPI), 2004., hlm. 72.

²³ *Ibid*, hlm. 72.

²⁴ *Ibid*, hlm. 73-74.

sebagai proses setelah Siam berhasil mengintegrasikan para raja atau pejabat Melayu Islam Patani.²⁵

Pada batas tahun 1932 M. Siam (Thailand) merubah indentitas politik Monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Pada tahun inilah, dimulai harapan dan impian baru akan perubahan nasib orang-rang Patani menjadi lebih baik, agar pemerintah Siam berpihak dan mendukung hak kemerdekaan bagi rakyat patani. Namun, sebaliknya, Siam semakin mengukuhkan proses integrasinya dengan memulai pendidikan nasional untuk mengartikulasikan kesatuan Thailand, yang bertujuan menyatukan semua etnis, tidak hanya etnis Melayu melainkan juga etnis Cina dan lainnya yang ada di wilayah Thailand. Dalam program ini, pemerintah menetapkan bahwa:

1. Negara memiliki hak untuk mendidik rakyat.
2. Negara memiliki otoritas penuh untuk mengontrol dan memantau program pendidikan di pemerintah dan sekolah swasta.
3. Setiap individu yang telah lulus wajib belajar bearti dia adalah warga negara yang mampu mendapatkan sumber daya hidup yang penting untuk bekerja, dan dia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, juga bisa membuktikan dirinya secara fungsional melalui di luar pekerjaannya.

D. Bagaimana Masyarakat Islam Patani di bawah Rezim Pemerintahan Thailand

Segera setelah diterapkan kebijakan integrasi reformasi administrasi Siam terhadap Patani, struktur politik kerajaan Melayu Patani mengalami perubahan, jabatan raja dicopot, raja kehilangan sumber penghasilan dari pajak, kemudian memancing kemarahan dari pihak raja. Kemarahan tersebut diilustrasikan raja-raja Patani dengan berbagai pemberontakan. Gerakan pemberontakan melawan Thailand tersebut dikoordinasi oleh raja Abdul Kadir Kamaruddin (raja terakhir Patani). Pertama-tama, para raja menolak melaksanakan perintah pemerintah Thailand mengikuti kebijakan reformasi administrasi dengan memboikot semua pertemuan yang diadakan pejabat-pejabat mereka sebagai raja.²⁶

Pemberontakan berlanjut hingga berakhir dengan ditangkapnya Abdul Kadir Kamaruddin dan dipenjarakan di Phitsanulok hingga tahun 1916 M. Setelah dibebaskan dari penjara, sultan dipindahkan untuk tinggal di Kelantan. Perjuangan yang dipelopori raja Abdul Kadir kamaruddin tersebut menginspirasi rakyat Melayu Patani untuk meneruskan perjuangan melawan ketertindasannya oleh Siam, melalui pemberontakan Namsai (sebuah kampung di Patani), Patani, menolak untuk membayar pajak dan sewa tanah ke pemerintah Siam sebagai respon terhadap penolakan reformasi pendidikan yang diperkenalkan tahun 1921 M.²⁷ Dan undang-undang Pendidikan Dasar Wajib 1921 yang mewajibkan seluruh anak-anak Patani sekolah di sekolahan negeri selama empat tahun untuk belajar bahasa Thailand²⁸. Melayu

²⁵ Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 30-31.

²⁶ *Ibid*, hlm. 33.

²⁷ Aphornsuwan Thanet, "The Origins Of Malay Muslim Separatism In Southern Thailand", (Asia Research Institute, Working Paper Series, No. 32, October 2004), hlm. 18-19.

²⁸ Moshe Yegar, *Between Integration And Seccesion: The Muslim Communitties Of The Southern Philipines, Southern Thailand, And Weteren Burma Myammar*, (USA: Lexington Books, 2002), hlm. 89.

Patani melihat hal aturan ini sebagai serangan terhadap budaya atas program Thaisasi. Dalam pemberontakan ini, terjadi bentrokan antara warga desa Namsai dengan aparat keamanan dengan jumlah korban terbanyak dari kalangan Melayu Patani.

Dalam banyak hal, pemberontakan Namsai merupakan suatu peristiwa yang unik dalam sejarah gerakan kemerdekaan Patani, dan menentukan arah bagi peristiwa-peristiwa seperti itu di kemudian hari. Perlawanan raja-raja Melayu di utara pun terjadi terhadap Inggris, bahkan pemberontakan-pemberontakan di kesultanan-kesultanan tersebut merupakan hal lazim, namun Inggris berhasil mengambil hati sultan-sultan tersebut dan menjatuhkan persekutuan mereka dengan para ulama. Sebaliknya, Siam menghadapi dua golongan Patani. Yakni kerabat raja dan para ulama. Kedua golongan itu saling mendukung dan bekerjasama dalam perjuangannya melawan kekuasaan Siam (Thailand).²⁹

Abdul Kadir Kamaruddin berhasil meyakinkan raja-raja Melayu, bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk membebaskan saudara-saudara mereka atas penindasan negara Thailand. Sehingga, tindakan Abdul Kadir Kamaruddin mendapat dorongan dan dukungan dari raja-raja Melayu. Dorongan dan dukungan raja-raja Melayu tersebut tidak terlepas dari kekhawatiran mereka bahwa suatu saat jabatan dan kekuasaan mereka pun akan digerogeti oleh Inggris, seperti yang telah dilakukan pemerintah Thailand terhadap raja Patani.

Walaupun tidak mendirikan organisasi resmi, Abdul Kadir Kamaruddin berhasil menata jalan dan hubungan di kalangan pro-Melayu di kesultanan-kesultanan Malaya Utara, sebagai sekutu-sekutu dalam perjuangan kemerdekaan Patani di masa mendatang. Dukungan tersebut, dirasa cukup dan berhasil ia kerahkan tahun 1922 M. Untuk menghentikan kampanye “men-Thai-kan” provinsi-provinsi Melayu di Thailand Selatan.³⁰

Kebijakan dalam pendidikan semakin diperketat, manakala sekolah negeri tersebut tidak hanya mengajarkan kurikulum sekuler Thai, tetapi juga mencakup pengajaran dalam etika Budha, dengan biarawan sebagai guru pelayarannya. Hal ini dianggap sebagai penghinaan terhadap umat Islam karena menyerang secara langsung budaya, agama, dan bahasa Melayu Patani. Akhirnya, masyarakat Patani tidak mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah yang berkurikulum sekuler.

Di bidang politik dan hukum, meskipun hukum Islam dibiarkan berjalan, terutama dalam masalah pernikahan, perceraian, dan warisan, orang Melayu Muslim belum puas dengan otonomi agama. Mereka menuntut otonomi politik. Dalam pemahaman mereka, bentuk lainnya otonomi, seperti di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan agama dapat dicapai melalui politik otonomi. Dipimpin oleh seorang pemimpin agama, Haji Sulong, menerbitkan permohonan, sebagai berikut:³¹

²⁹ Surin Pitsuwan, *Islam di Mungthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 51.

³⁰ *Ibid*, hlm. 53.

³¹ Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*, (Kuala Lumpur: Hizbi Shah Alam, 1993), hlm. 197.

1. Seorang pemimpin memiliki otoritas penuh untuk mengatur empat provinsi di Selatan. Pemimpin ini memiliki otoritas penuh untuk menghentikan, menggantikan, dan memilih semua pejabat pemerintah di empat provinsi. Pemimpin harus penduduk asli yang ditanggung atau berasal dari salah satu empat provinsi dan dipilih oleh seluruh orang di empat provinsi.
2. Semua pendapatan daerah dan sumber daya alam yang berasal dari empat provinsi harus dimanfaatkan demi kepentingan umum di Patani.
3. Mengadakan pelajaran Bahasa Melayu di peringkat Sekolah Dasar (SD) sehingga ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebelum mempelajari bahasa Siam/Thailand.
4. 80% dari para pejabat pemerintah di masing-masing provinsi harus Muslim.
5. Bahasa Melayu dan Siam/Thailand harus menjadi bahasa resmi.
6. Pengakuan hukum Islam, dan pelaksanaannya dalam otonomi pengadilan Islam, yang dipisahkan dari pengadilan sipil, dengan Qadhi sebagai hakim Muslim.
7. Pembentukan badan Islam yang mempunyai wewenang penuh untuk mengatasi masalah yang dihadapi Muslim bawah kendali pemimpin sebagaimana dimaksud dalam poin pertama.

Akibat, dilaksanakannya kebijakan integrasi Thailand terhadap Patani, memancing pemberontakan dari kalangan elit Patani dan gerakan bawah tanah dari kalangan rakyat biasa Patani. Pemberontakan dan gerakan bawah tanah tersebut mendapat dukungan dan respon dari dunia internasional, khususnya dari negara Arab dan tetangga (Malaysia).³²

Untuk pertama kalinya, isu Patani menarik perhatian internasional semakin meluas termasuk Liga Arab dan PBB.³³ Langkah yang paling penting adalah penciptaan pada februari 1944, dari Gabungan Melayu Patani Raya (GAMPAR) atau Asosiasi Raya Melayu Patani di Kelantan. Ini menjadi organisasi untuk mengkoordinasikan berbagai elemen bekerja untuk pembebasan akhir Patani Raya. Itu mendapat dukungan dari kelompok-kelompok Melayu di Thailand dan juga dari Partai Nasionalis Melayu di Malaya. Situasi itu intens dilakukan. Operasi gerilya mulai bergerak melintas perbatasan dari dalam Malaya ke Thailand Selatan. Pemimpin keagamaan di kedua sisi perbatasan itu menyerukan jihad (perang Suci) terhadap pihak Thai

Kesimpulan

Ada tiga faktor yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Islam Patani yaitu pertama, lemahnya pemerintahan kerajaan Melayu Patani di bidang ekonomi, pertahanan dalam negeri. Kedua, persengketaan dengan kerajaan Siam sebagai musuh tradisi bangsa Melayu, penyerangan kerajaan Siam terhadap Patani pada tahun 1785 M. Ini disebabkan kekuatan pertahanan musnah akibat seorang rakyat Patani keturunan Siam (Thailand) membocorkan rahasia pertahanan kepada pihak Siam (Thailand). Ketiga, akibat dari kemelut politik dalam

³² Erni Budiwanti, "*Minoritas Muslim di Filipina, Thailand dan Myanmar: Masalah Resepsi Politik*", dalam Riza Sihbudi, *Problematisasi Minoritas Muslim di Asia Tenggara: Kasus Moro, Patani, dan Rohingya*, (Jakarta: Puslitbang Politik dan Kewilayahan, LIPI, 2000), hlm. 129.

³³ Thanet Aphornsuwan, *History and Politics of The Muslims Thailand*, (Bangkok: Thammasat University, 2003), hlm. 24.

Istana, berawal ketiadaan pengganti yang terdekat menyebabkan keadaan politik Patani menjadi kucar-kacir. Para pembesar negeri turut terlibat dalam perebutan kuasa sehingga raja Patani di anggap sebagai boneka. Kekacauan politik itu secara langsung telah menjejaskan kemajuan ekonomi, saudagar-saudagar asing tidak lagi berminat untuk berniaga di Patani.

Setelah kerajan Melayu Patani jatuh dalam kekuasaan pemerintahan Thailand, dan pemerintah menerapkan beberapa kebijakan yang merugikan umat Islam yaitu: kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintahan Thailand seperti pembaharuan di bidang ekonomi, politik, budaya dan pendidikan, yang bertujuan untuk menggantikan identitas kultural dan agama orang Melayu- Muslim dengan identitas kultural Thailand yang berlandaskan Budhisme. Pemerintahan percaya bahwa kesadaran hanya dapat dicapai melalui rancangan sosial-budaya yang berdasarkan konsep nasionalisme, kebudayaan Siam (Thailand) dan agama Budha. Dengan kesadaran tersebut, pemerintahan yakin dapat menumbuhkan adat resam Siam (Thailand).

Pada saat pemerintahan Thailand melancarkan berbagai program pembaharuan dengan tujuan untuk menjadikan semangat kebangsaan Thailand sebagai pegangan hidup orang-orang Thailand tidak terkecuali juga masyarakat Melayu Patani. Dengan semangat pembaharuan ini langsung menyentuh dasar-dasar eksistensi yang paling dalam, yang memberi dampak negatif dalam kehidupan umat Islam Patani. Mereka menuntut otonomi politik. Dalam pemahaman mereka, bentuk lainnya otonomi, seperti di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan agama dapat dicapai melalui politik otonomi. Dipimpin oleh seorang ulama yaitu, Haji Sulong

Akibat, dilaksanakannya kebijakan integrasi Thailand terhadap Patani, memancing pemberontakan dari kalangan elit Patani dan gerakan bawah tanah dari kalangan rakyat biasa Patani. Pemberontakan dan gerakan bawah tanah tersebut mendapat dukungan dan respon dari dunia internasional, khususnya dari negara Arab dan Malaysia. Bagi masyarakat Melayu Patani sendiri tidak pernah merasa sebagai bagian dari bangsa Thailand. Oleh karena itu, mereka tidak ingin diatur oleh Bangkok, mereka ingin mengatur diri mereka sendiri.

Daftar Pustaka

- A. Malek, Mohd Zamber. 1993. *Umat Islam Patani, Sejarah dan Politik*, Shah Alam: Perpustakaan Negara Malaysia.
- Abdulrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- al-Fatani, Ahmad Fathy. 1994. *Pengantar Sejarah Patani*. Pustaka Darussalam, Alor Star,
- Bangnara, A. 1977. *Sejarah Patani Dahulu dan Sekarang*. Kota Bharu, Kelantan: Pustaka Aman Press.
- Hasbullah, Moeflich. 2003. *Asia Tenggara Konsentrasi Baru kebangkitang Islam*. Bandung: Fokusmedia.
- Hayee, Faisol. _____. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Warga Minoritas Muslim Melayu Patani (Studi Kasus di Amphe Bannang Seta, Selatan Thailand)*, Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.

- Nik Mahmud, Nik Anuar. 2006. *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*. Selangor: Perpustakaan Negara Malaysia.
- Pamungkas, Cahyo. 2004. “*The State Policies Towards Southern Border Provinces*”, dalam *Multiculturalism, Seoratism and Nation State Building in Thailand*, Jakarta: Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR-LIPI).
- Pitsuwan, Surin. 1989. *Islam di Mungthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, Jakarta: LP3ES.
- Sodiqin, Ali. 2016. Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik Dan Dinamikanya). *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam Vol. 14, No. 1, Januari – Juni*.
- Syukri, Ibrahim. 2002. *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Yuniarto, Paulus, Rudolf. ____ *Integrasi Muslim Patani: Reidentitas Sosial atas Dominasi “NasionalThailand”*, _____